

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah pusat telah menetapkan kebijakan bahwa pemerintah tingkat desa diberikan wewenang untuk mengatur anggaran secara mandiri. Dalam pemerintah desa terdapat suatu susunan anggaran yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat. Menurut UU Nomor 5 tahun 2015 pasal 2 yang berbunyi “Dana Desa yang bersumber dari APBN digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang diatur dan diurus oleh Desa. Berdasarkan undang – undang tersebut pemerintah desa harus dapat mengelola dana sesuai prosedur yang sudah ditetapkan pemerintah pusat

Anggaran merupakan hal penting bagi suatu pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan. Anggaran atau *budget* dapat diartikan sebagai rencana operasi keuangan untuk suatu periode yang akan datang. Anggaran tersebut digunakan pemerintah dalam menetapkan kebijakan - kebijakan guna mengatur pengeluaran pemerintah, perpajakan, dan pinjaman untuk mencapai stabilitas ekonomi yang baik. Anggaran yang berasal dari pemerintah pusat disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Fungsi APBN adalah mengelola segala bentuk pendapatan dan pengeluaran negara agar tepat sasaran. Menurut Lestari dkk (2015) fungsi APBN untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan

nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum.

Secara nasional, pemerintah telah mengalokasikan anggaran dana desa dengan nilai yang cukup fantastis untuk sebuah program/kebijakan yang baru. Berdasarkan data pada Kementerian Keuangan RI (Nota Keuangan) tahun 2017, jumlah dana desa yang telah dianggarkan oleh pemerintah dalam 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebesar Rp.127,75 triliun. Dengan rincian sebagai berikut: pada tahun 2015 sebesar Rp.20,77 triliun, tahun 2016 sebesar Rp.46,98 triliun, dan tahun 2017 sebesar Rp.60 triliun. Momentum dana desa diharapkan dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Secara khusus dana desa diharapkan dapat mengurangi jumlah desa tertinggal sampai 5.000 desa, dan meningkatkan jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa pada tahun 2019. Fakta menunjukkan bahwa pada tahun 2015 jumlah desa mandiri sebanyak 3.608 dari 73.709 atau 4,89% dan jumlah desa tertinggal sebanyak 33.592 dari 73.709 atau 45,57%. (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, 2015).

Masyarakat desa perlu mengetahui dana yang di berikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah desa. Maka dari itu, perlu adanya pertanggungjawaban dari pemerintah desa untuk mengelolanya. Dalam pengelolaan pemerintah harus bersikap transparan, jujur, adil dan bijaksana. Sikap yang telah dijelaskan di atas disebut dengan akuntabilitas. Menurut Widyatama dkk (2017) Akuntabilitas bagi pemerintah dinilai sangat penting untuk dimiliki, disebabkan adanya akuntabilitas

tersebut akan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aktivitas yang telah dilakukan oleh pemerintah. Suatu pemerintah dikatakan akuntabel jika memiliki kemampuan untuk menjelaskan kondisi yang dialami termasuk didalamnya keputusan yang diambil dan berbagai aktivitas yang dilakukan.

Akuntabilitas merupakan suatu konsep pertanggungjawaban atas tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Akuntabilitas juga dapat diartikan sebagai pengungkapan kondisi suatu pemerintahan yang berkaitan dengan pencapaian suatu tujuan, dimana tujuan utamanya adalah pemberian jawaban atas suatu aspek yang dialami oleh pemerintah. **Mardiasmo (2006) akuntabilitas** merupakan bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Kebijakan – kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah diharapkan dapat menghasilkan hal yang dapat mendukung kemajuan daerah dan masyarakat. Pemerintah juga diharapkan dapat menjalankan amanah yang telah diberikan masyarakat tersebut. Dalam kajian islam, manusia diajarkan untuk dapat bertanggung jawab atas perbuatannya kepada sesama manusia. Seperti yang termuat dalam Al Qur'an Surah An-Naml Ayat 18 :

حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ فَقَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ
سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

Artinya : *“Hingga apabila mereka (rombongan Nabi Sulaiman) sampai di lembah semut berkatalah seekor semut: Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari”* (QS.an-Naml:18). Ayat diatas membahas tentang seekor semut yang berseru kepada teman-temannya untuk berlindung dari bahaya. Ayat ini mengajarkan kepada kita tentang sikap tanggung jawab terhadap sesama manusia untuk saling mengingatkan dalam kebaikan dan keselamatan.

Akuntabilitas yang baik akan tercipta jika kinerja pemerintah memiliki komitmen yang baik dalam mencapai tujuan kerja pemerintah. Komitmen organisasi adalah sebuah sikap mental yang mewakili keorganisasian keinginan, kebutuhan dan kewajiban untuk melanjutkan pekerjaan dalam suatu organisasi (Siwambudi dkk, 2017). Komitmen itu sendiri memiliki peran penting di dalam pemerintahan untuk menjalankan tugas karena dapat mempengaruhi individu yang terlibat dalam pemerintahan. Komitmen organisasi merupakan tingkat sampai sejauh mana seorang pegawai memihak pada suatu organisasi tertentu dan keterlibatan pegawai untuk mencapai tujuan organisasi, serta berniat untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi itu (Syaifullah, 2014).

Pemerintahan memiliki struktur organisasi yang terdiri dari berbagai latar belakang suku budaya, gender maupun pola pikir yang berbeda. Keberadaan budaya organisasi dapat dirasakan melalui perilaku anggota atau karyawan di dalam organisasi, seperti dari cara berpikir, merasakan, menanggapi dan menuntun para anggota organisasi dalam mengambil keputusan maupun kegiatan-kegiatan lainnya dalam organisasi (Robbin dan Coulter, 1999). Manfaat dari

penerapan budaya organisasi yang baik adalah dapat meningkatkan jiwa gotong royong, meningkatkan kebersamaan, saling terbuka satu sama lain, meningkatkan jiwa kekeluargaan, meningkatkan rasa kekeluargaan, membangun komunikasi yang lebih baik, meningkatkan produktivitas kerja, tanggap dengan perkembangan dunia luar, dan lain sebagainya (Oemar, 2013). Penerapan budaya organisasi dalam pemerintahan sangat penting karena dapat mempengaruhi kinerja dan akuntabilitas. Ritchie di dalam Brahmasari (2000) membuktikan bahwa budaya organisasi mempengaruhi berbagai *outcomes* seperti produktivitas, kinerja, komitmen, kepercayaan diri, dan perilaku etis. Sama halnya di pemerintahan pusat, pemerintahan desa yang kental dengan budaya dan adat istiadat pun juga perlu menerapkan budaya organisasi yang baik agar tercipta kebersamaan antar staf sehingga tidak terjadi konflik di dalam pemerintahan.

Pemerintah diharapkan dapat bertanggung jawab atas tugas yang diberikan secara efektif dan akuntabel. Tercapainya akuntabilitas jika para staf pemerintahan perlu adanya motivasi kerja yang baik. Pegawai yang memiliki motivasi kerja tentunya akan membuat pilihan terbaik untuk melakukan sesuatu. Motivasi kerja juga dapat memacu individunya untuk bekerja lebih keras, karena hal ini dapat menciptakan kepuasan diri pribadi individu tersebut dan tujuan instansi dapat dicapai. Seorang kepala pemerintahan juga dituntut untuk mengatur para anggotanya untuk bekerja dengan baik dan sesuai dengan arahan yang diberikannya dan diperlukan adanya motivasi. Motivasi adalah dorongan, upaya dan keinginan yang ada di dalam diri manusia yang mengaktifkan, memberi daya serta mengarahkan perilaku untuk melaksanakan tugas-tugas dengan baik dalam

lingkup pekerjaannya (Salutondok, 2015). Adapun elemen yang terkandung dalam motivasi meliputi unsur membangkitkan, mengarahkan, menjaga, menunjukkan intensitas, bersifat terus menerus. Motivasi berperan penting dalam lingkungan kerja karena dapat mempengaruhi kinerja disetiap staf organisasi atau pemerintahan. Motivasi kerja merupakan keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai suatu tujuan (Handoko, 2001). Terbentuknya motivasi kerja dapat didukung dengan pemberian kompensasi dan hukuman (*punishment*) terhadap individu maupun staf pemerintahan. Pemberian kompensasi dan hukuman tersebut dapat mendorong kinerja staf pemerintahan untuk memberikan akuntabilitas yang baik.

Pemerintah perlu memberikan kinerja yang efektif dan efisien dalam melaksanakan seluruh kegiatannya, maka diperlukan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban. Terwujudnya kinerja yang baik diperlukan suatu sistem yang memadai dan dapat digunakan untuk mengendalikan dan mengawasi setiap kegiatan agar dapat terlaksana sesuai tujuan. Sistem tersebut disebut dengan Sistem Pengendalian Internal (SPI). Sistem pengendalian internal dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal yang menyatakan bahwa :
“Sistem pengendalian internal adalah proses yang terintegral pada tindakan dan kegiatan untuk memberikan pemahaman yang memadai tentang tercapainya tujuan dari suatu organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, pelaporan keuangan yang andal, pengamatan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan

perundang-undangan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan pegawai.

Berdasarkan penelitian terdahulu Anwar dan Jatmiko (2014) mengatakan masih sangat banyak desa yang belum mampu mengoptimalkan sumber - sumber pendapatan, kekayaan dan potensi desanya. Mereka masih tergantung dari dana yang diberikan oleh pemerintah pusat. Di Kabupaten Sleman banyak mempunyai objek wisata, kekayaan alam, potensi desa yang masih alami akan tetapi desa – desa yang mempunyai potensi tersebut belum mampu menjadikan pendapatannya sebagai sumber dana pembangunan serta kesejahteraan secara mandiri dan masih bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang berasal dari pemerintah pusat.

Akuntabilitas dana desa merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh aparat pemerintah desa. Pelaksanaan akuntabilitas yang baik tak lepas dari peran masyarakat yang terdapat dalam desa tersebut. Peran aktif masyarakat diperlukan untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pembangunan. Menurut Makalalag (2017), dalam pencapaian laporan realisasi anggaran APBDes masyarakat diharapkan dapat mengetahui langsung bagaimana pencapaian kinerja pemerintah desa tersebut dalam mengelola dana desa.

Akuntabilitas dana desa yang telah dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Sleman menurut laporan realisasinya tergolong cukup baik yaitu di angka 80%. Namun di beberapa kecamatan dan desa di Kabupaten Sleman belum semuanya dapat merealisasikan dana desa tersebut dengan baik. Seperti di desa se kecamatan Ngaglik, dana yang diberikan oleh pemerintah sebesar 5 milyar belum dapat

direalisasikan seluruhnya. Berikut tabel data realisasi anggaran pada desa – desa di Kecamatan Ngaglik Laporan konsolidasi Realisasi Penyerapan Dana Desa Kabupaten Sleman Tahun 2017 :

TABEL : 1
Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan Dana Desa
se - Kecamatan Ngaglik Tahun 2017

Nama Desa	Dana Anggaran	Realisasi	Pencapaian Output	Kegiatan
Desa Sariharjo	Rp 916.059.000	Rp 542.352.065	70%	13
Desa Minomartani	Rp 887.198.000	Rp 484.036.800	73%	26
Desa Sinduharjo	Rp 906.633.000	Rp 412.604.000	96%	10
Desa Sukoharjo	Rp 960.560.000	Rp 530.786.000	95%	15
Desa Sardonoharjo	Rp 972.707.000	Rp 452.009.000	85%	23
Desa Donoharjo	Rp 887.672.000	Rp 421.775.000	59%	14

<https://dinpmd.slemankab.go.id/2017/10/dana-desa-semester-i>

Berdasarkan data yang terdapat pada tabel 1, masih terdapat desa yang belum bisa memaksimalkan anggaran tersebut. Tentunya masyarakat di desa – desa tersebut sangat mengharapkan dana desa yang diberikan oleh pemerintah dapat terealisasi keseluruhannya dengan baik dan sejalan dengan undang – undang serta kebijakan pemerintah.

Penelitian ini merupakan penelitian replikasi dari Widyatama dkk (2017) dengan judul Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) dengan menambahkan variable motivasi kerja dan budaya organisasi sebagai

variable independen. Variabel motivasi didasarkan pada adanya perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh taufik (2018) dan rizal (2017). Sedangkan variabel budaya organisasi didasarkan pada perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh Prihono (2016), Ismail (2008). Dari hasil pra survey yang disebar ke seluruh kantor desa di wilayah Kecamatan Ngaglik sebanyak 30 responden dari 6 desa sebagai berikut :



Diagram 1 : Komitmen Organisasi

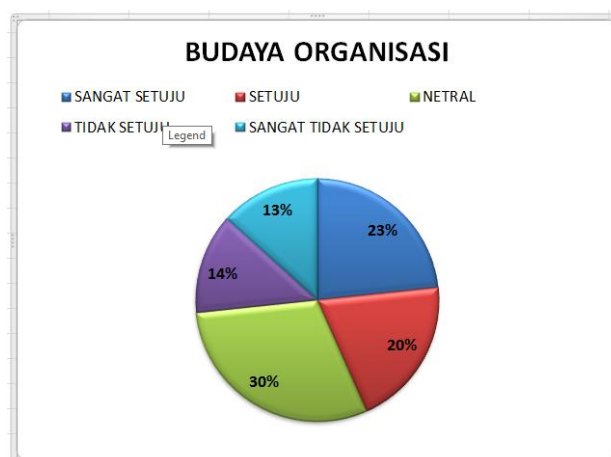


Diagram 2 : Budaya Organisasi

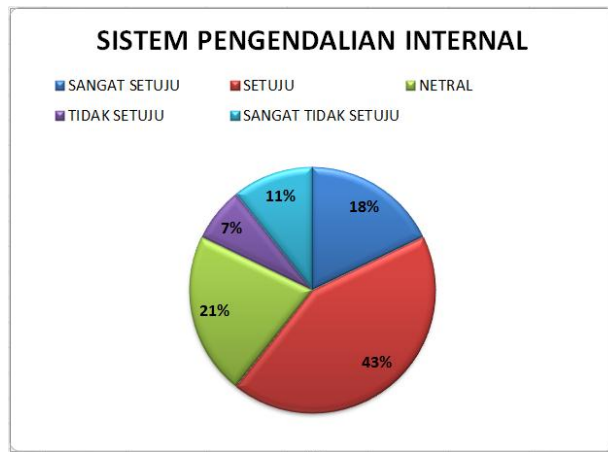


Diagram 3 : Sistem Pengendalian Internal

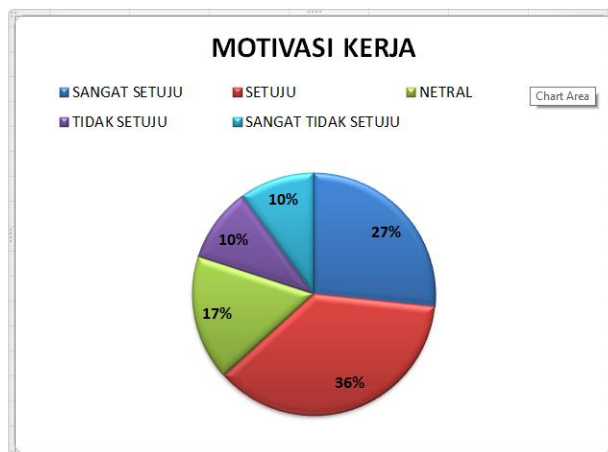


Diagram 4 : Motivasi Kerja

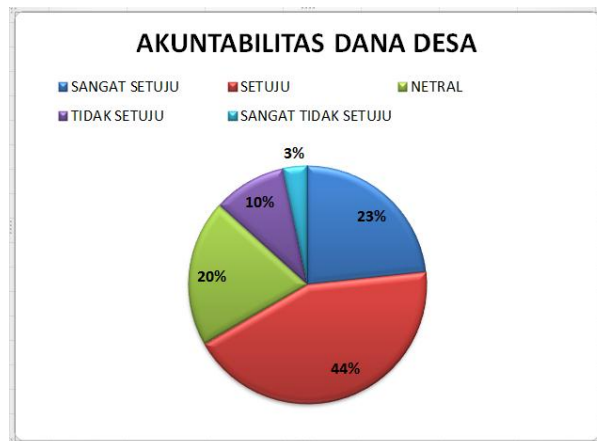


Diagram 5 : Akuntabilitas Dana Desa

Diagram tersebut berasal dari data responden yang diambil secara acak di setiap kantor Desa se Kecamatan Ngaglik dengan perwakilan masing-masing 5 responden.

Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu maka, akan dilakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan komitmen, budaya, motivasi dan pengendalian internal. Maka dari itu, judul dalam penelitian ini adalah **“Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi, Motivasi Kerja dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Dana Desa (Survei Pada Kantor Desa di Wilayah Kecamatan Ngaglik)”**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak meluas permasalahannya, maka diperlukan batasan masalah agar penelitian ini menjadi akurat. Batasan masalah pada penelitian ini adalah Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi, Motivasi Kerja dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Dana Desa Pada Kantor Desa di Wilayah Kecamatan Ngaglik.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dana desa di desa –desa Se Kecamatan Ngaglik?
2. Apakah budaya organisasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dana desa di desa –desa Se Kecamatan Ngaglik?
3. Apakah motivasi kerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dana desa di desa –desa Se Kecamatan Ngaglik?
4. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dana desa di desa –desa Se Kecamatan Ngaglik?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris apakah komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dana desa di Desa – Desa se Kecamatan Ngaglik?
2. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris apakah budaya organisasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dana desa di Desa – Desa se Kecamatan Ngaglik?
3. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris apakah motivasi kerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dana desa di Desa – Desa se Kecamatan Ngaglik?
4. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris apakah sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dana desa di Desa – Desa se Kecamatan Ngaglik?

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memberikan bukti mengenai “Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi, Motivasi Kerja Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Dana Desa (Survei Pada D Desa Di Wilayah Kecamatan Ngaglik). Selain itu hasil penelitian ini diharapkan memberikan tambahan informasi dan wawasan yang lebih luas bagi penulis serta

dapat dijadikan referensi bagi peneliti berikutnya yang tertarik pada bidang kajian ini.

- b. Penelitian ini dapat menjadi bahan literasi tambahan untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan “Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi, Motivasi Kerja Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Dana Desa (Survei Pada Kantor Desa Di Wilayah Kecamatan Ngaglik)”.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk pengembangan Ilmu Akuntansi khususnya dalam bidang Akuntansi Sektor Publik.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Pemerintah Desa di Kecamatan Ngaglik

Diharapkan mampu menjadi masukan positif dan bahan evaluasi terhadap kinerja instansi pemerintah yang lebih baik untuk kedepannya.

b. Bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Diharapkan mampu menjadi bahan pemikiran mengenai kinerja instansi pemerintah desa dan diharapkan mampu menjadi referensi atau informasi untuk mengembangkan dan memajukan desa.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat menjadi informasi atas pencapaian kinerja pemerintah desa serta referensi untuk mengungkapkan aspirasi masyarakat desa.

d. Bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan

Diharapkan mampu menjadi bahan referensi pemikiran penelitian selanjutnya tentang kinerja pemerintah desa.